

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU ENERGI BARU  
DAN TERBARUKAN PASCA-RATIFIKASI *PARIS AGREEMENT*  
PERIODE 2015–2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RAHMANDA ISNAINA HANUM  
NPM 2216071027**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU ENERGI BARU  
DAN TERBARUKAN PASCA-RATIFIKASI *PARIS AGREEMENT*  
PERIODE 2015–2024**

**Oleh**

**RAHMANDA ISNAINA HANUM**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PASCA-RATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* PERIODE 2015–2024

Oleh

**RAHMANDA ISNAINA HANUM**

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi perubahan iklim dan mendorong transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realisasi domestik, yang terlihat dari masih dominannya energi fosil dan belum tercapainya target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Kesenjangan ini penting dikaji karena dapat memengaruhi arah, posisi, dan kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam rezim iklim global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT pasca-ratifikasi *Paris Agreement* pada periode 2015–2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Foreign Policy Analysis* (FPA) dari Morin dan Paquin, yang memandang kebijakan luar negeri sebagai *foreign policy behavior* atau perilaku negara yang dapat diamati. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia berkembang melalui tiga fase, yaitu komitmen formal dan kepatuhan awal pada 2015–2016, penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap pada 2017–2021, serta akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan pada 2022–2024. Penelitian ini menemukan empat pola utama, yaitu kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi domestik, dominasi pendekatan multilateral, ketergantungan pada pendanaan dan kerja sama internasional, serta kebijakan yang adaptif dan bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT merupakan strategi adaptif untuk menyeimbangkan tuntutan rezim iklim global dengan keterbatasan domestik.

**Kata kunci:** kebijakan luar negeri, energi baru dan terbarukan, *Paris Agreement*, Indonesia, FPA.

## ABSTRACT

### INDONESIA'S FOREIGN POLICY ON NEW AND RENEWABLE ENERGY ISSUES AFTER THE RATIFICATION OF THE PARIS AGREEMENT, 2015–2024

By

**RAHMANDA ISNAINA HANUM**

Indonesia has ratified the Paris Agreement as a form of commitment to addressing climate change and promoting the transition toward new and renewable energy. However, this commitment has not been fully aligned with domestic realization, as reflected in the continued dominance of fossil energy and the failure to achieve the 23% new and renewable energy mix target by 2025. This gap is important to examine because it may affect the direction, position, and credibility of Indonesia's foreign policy within the global climate regime. This study aims to analyze Indonesia's foreign policy on new and renewable energy issues after the ratification of the Paris Agreement during the 2015–2024 period.

This study applies the Foreign Policy Analysis (FPA) approach by Morin and Paquin, which views foreign policy as foreign policy behavior, or observable state behavior. This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through literature study and documentation. The data were obtained from official government documents, reports from international institutions, and relevant academic literature.

The findings show that Indonesia's foreign policy developed through three phases: formal commitment and initial compliance in 2015–2016, policy adjustment and gradual compliance in 2017–2021, and cooperation acceleration and funding diplomacy in 2022–2024. This study identifies four main patterns: the gap between international commitment and domestic realization, the dominance of the multilateral approach, dependence on international funding and cooperation, and adaptive and gradual policy. These findings show that Indonesia's foreign policy on new and renewable energy issues is an adaptive strategy to balance the demands of the global climate regime with domestic limitations.

**Keywords:** *foreign policy, new and renewable energy, Paris Agreement, Indonesia, FPA.*

Judul Skripsi : Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Energi  
Baru dan Terbarukan Pasca-Ratifikasi Paris  
Agreement Periode 2015–2024

Nama Mahasiswa : **Rahmanda Isnaina Hanum**

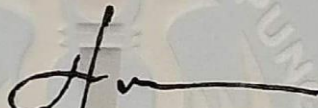
Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071027

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### MENYETUJUI

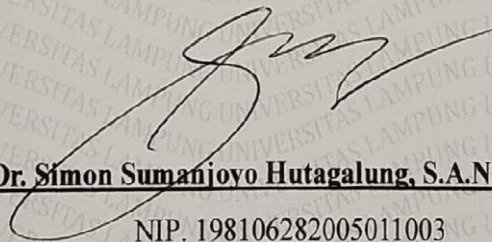
#### 1. Komisi Pembimbing



**Hasbi Sidik, S.I.P., M.A.**

NIP. 197912302014041001

#### 2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



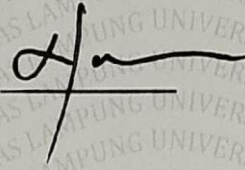
**Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.**

NIP. 198106282005011003

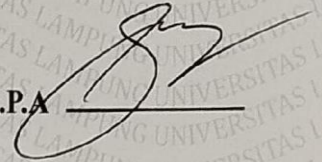
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



Penguji Utama: **Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung., S.A.N., M.P.A**

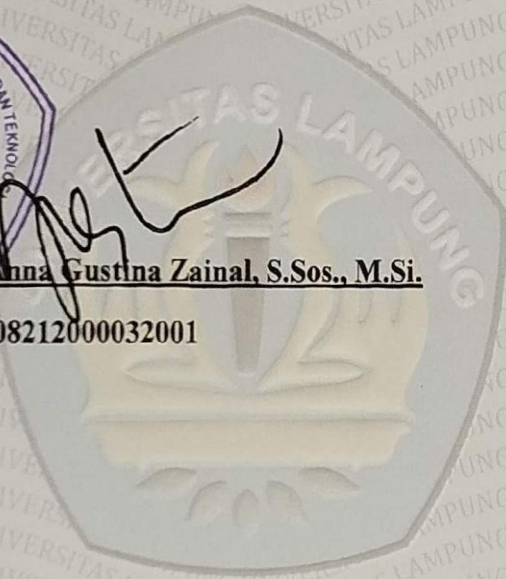


**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Juni 2026

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Rahmanda Isnaina Hanum

NPM 2216071027

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rahmanda Isnaina Hanum, lahir di Lampung pada tanggal 26 Januari 2004 dari pasangan Bapak Rohmad dan Ibu Munah. Penulis memulai pendidikan formal di TK PGRI Saptu Mulyo, Kecamatan Kota Gajah. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Saptu Mulyo, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Gajah dan SMA Negeri 1 Kota Gajah. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, kerelawanan, dan pengembangan diri. Penulis pernah menjadi Sekretaris UKM Bulutangkis Universitas Lampung, Fasilitator Sebaya Layanan Konseling FISIP Universitas Lampung, staf bidang sumber daya manusia Society of Renewable Energy (SRE) Universitas Lampung, serta aktif dalam Komunitas Wikimedia Bandar Lampung dan Green Student Movement WALHI Lampung. Penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, dan akademik, seperti donor darah, diskusi akademik, penanaman mangrove, kegiatan hak atas pangan, bantuan pangan BULOG, serta Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) di Lampung Tengah dan dipercaya sebagai sekretaris kelompok. Selain itu, penulis juga mengikuti magang mandiri selama satu semester di PT Great Giant Pineapple pada Departemen Kawasan Berikat.

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

— *Q.S. Al-Insyirah: 6*

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa  
Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya  
Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya  
Rayakan perasaanmu sebagai manusia”

— *Hindia, Mata Air*

“Besok mungkin kita sampai.”

— *Hindia, Besok Mungkin Kita Sampai*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga Besar Penulis

Khususnya untuk Bapak, Mamak, Mba, Adek, Mbah, sebagai wujud terima kasih penulis karena tanpa henti memanjatkan doa dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Serta

Almamater Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala proses yang menyertainya. Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan panjang penulis dalam belajar, bertumbuh, dan memahami arti ketekunan serta tanggung jawab. Skripsi dengan judul **“Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Energi Baru dan Terbarukan Pasca-Ratifikasi Paris Agreement Periode 2015–2024”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan diri, rasa lelah, hingga keraguan yang kerap muncul. Namun, di balik semua itu, terdapat begitu banyak dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga titik ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas akademik selama penulis menempuh pendidikan;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan arahan, kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bang Hasbi Sidik S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Mba Astiwi Inayah S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat berarti dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.

5. Mas Indra Jaya Wiranata S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, serta dukungan selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bantuan, serta pembelajaran berharga selama penulis menempuh pendidikan.
7. Keluarga penulis tercinta, khususnya kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat penulis, baik yang telah menemani sejak lama maupun yang hadir selama masa perkuliahan, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan kebersamaan dalam berbagai keadaan.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan, serta saling mendukung dan menguatkan dalam proses belajar hingga penyusunan skripsi.
10. Teman-teman Society of Renewable Energy, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, kebersamaan, serta ruang bagi penulis untuk berkembang selama menjalani kehidupan organisasi.
11. Teman-teman KKN Desa Gaya Baru 3 Kelompok 2, yang telah menjadi keluarga baru dan memberikan banyak pengalaman, kehangatan, serta kenangan berharga selama masa pengabdian.
12. Bapak dan Ibu kos serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Universitas Lampung.
13. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, Rahmanda Isnaina Hanum, yang telah berusaha, bertahan, dan terus melangkah dalam setiap proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah rasa lelah, ragu, dan berbagai keterbatasan yang ada. Terima kasih karena tetap memilih untuk menyelesaikan perjalanan ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

Penulis,

Rahmanda Isnaina Hanum

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Teori <i>Foreign Policy Analysis</i> .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	19
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	23
3.2 Fokus Penelitian .....	24
3.3 Sumber Data .....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Kondisi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (2015–2024).....	29
4.1.1 Komitmen Indonesia dalam <i>Paris Agreement</i> .....	29
4.1.2 Perkembangan Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (2015–2024)....	32
4.2 Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Energi Baru dan Terbarukan.....	36
4.2.1 Periode 2015–2016: Masa Komitmen Formal dan Kepatuhan Awal terhadap <i>Paris Agreement</i> .....	36
4.2.2 Periode 2017–2021: Masa Penyesuaian Kebijakan dan Kepatuhan Bertahap.....	40
4.2.3 Periode 2022–2024: Akselerasi Kerja Sama dan Diplomasi Pendanaan .....	44
4.2.4 Rangkuman Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015–2024 .....	49
4.3 Pola Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu EBT.....	52
4.3.1 Kesenjangan antara Komitmen Internasional dan Realisasi Domestik ..55	
4.3.2 Dominasi Pendekatan Multilateral.....	57
4.3.3 Ketergantungan pada Pendanaan dan Kerja Sama Internasional.....	59
4.3.4 Kebijakan yang Adaptif dan Bertahap.....	62
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Bauran Energi Primer Indonesia 2023.....	3
2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
3. Komponen analisis data: <i>interactive model</i> .....	27
4. Tren Bauran Energi Baru Terbarukan Indonesia Tahun 2015–2024.....	33

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Analisis Kesenjangan antara Komitmen dan Realisasi Transisi Energi di Indonesia.....	4
2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	10
3. Kerangka Analisis Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Energi Baru dan Terbarukan.....	30
4. Bauran Energi Baru dan Terbarukan (Persen), 2015–2024.....	32
5. Pemetaan Tindakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Periode 2015–2016 terhadap Indikator <i>Paris Agreement</i> .....	37
6. Pemetaan Tindakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Periode 2017–2021 terhadap Indikator <i>Paris Agreement</i> .....	41
7. Pemetaan Tindakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Periode 2022–2024 terhadap Indikator <i>Paris Agreement</i> .....	46
8. Rangkuman Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Energi Baru dan Terbarukan 2015–2024.....	49
9. Pola Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu EBT (2015–2024).....	53

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	: <i>Business as Usual</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
CASE	: <i>Clean, Affordable, and Secure Energy</i>
CCT	: <i>Clean Coal Technology</i>
CETP	: <i>Clean Energy Transitions Programme</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
COP21	: <i>Conference of the Parties ke-21</i>
COP28	: <i>Conference of the Parties ke-28</i>
EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
ENDC	: <i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FPA	: <i>Foreign Policy Analysis</i>
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
IEA	: <i>International Energy Agency</i>
IESR	: <i>Institute for Essential Services Reform</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnership</i>
KEN	: Kebijakan Energi Nasional
MTOE	: <i>Million Tonnes of Oil Equivalent</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
NZE	: <i>Net Zero Emissions</i>
Perpres	: Peraturan Presiden
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUEN	: Rencana Umum Energi Nasional
SSTC	: <i>South-South and Triangular Cooperation</i>

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri  
UNFCCC : *United Nations Framework Convention on Climate Change*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar pada abad ke-21, yang ditandai dengan naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi bencana alam seperti kekeringan dan banjir, kebakaran hutan akibat kenaikan suhu, serta fluktuasi curah hujan yang tidak menentu (UN Indonesia, t.t.). Kondisi ini mendorong munculnya rezim internasional di bidang perubahan iklim yang menekankan pentingnya transisi energi dari sumber fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam penelitian ini, energi baru dan terbarukan (EBT) dipahami sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil. EBT berasal dari pengelolaan proses alam yang berkelanjutan dan mencakup sumber energi yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, biomassa, dan bioenergi, serta energi baru yang dikembangkan melalui teknologi tertentu. Selain itu, EBT juga memiliki sifat yang lebih ramah lingkungan karena dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan membantu mengatasi pemanasan global (Sarante, 2024). Definisi ini penting karena penelitian ini membahas EBT sebagai bagian dari agenda transisi energi dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons Paris Agreement.

Selanjutnya, Paris Agreement menjadi salah satu dasar penting dalam agenda transisi energi global. Tujuan utama kesepakatan ini adalah membatasi kenaikan suhu bumi agar tetap berada di bawah 2°C dan berupaya lebih jauh menuju 1,5°C, sebagaimana tercantum dalam Paris Agreement (United Nations, 2015).

Kesepakatan global melalui *Conference of the Parties* ke-21 (COP21) pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Paris menjadi tonggak penting dalam diplomasi iklim dunia. *Paris Agreement* menetapkan kewajiban hukum (*legally binding*) bagi seluruh negara untuk menetapkan target penurunan emisi masing-masing dalam bentuk *Nationally Determined Contributions* (NDC). Melalui NDC, negara-negara menyampaikan rencana aksi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan strategi adaptasi iklim yang disesuaikan dengan kapasitas nasionalnya (Keohane & Victor, 2016). Berbeda dengan Protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju untuk

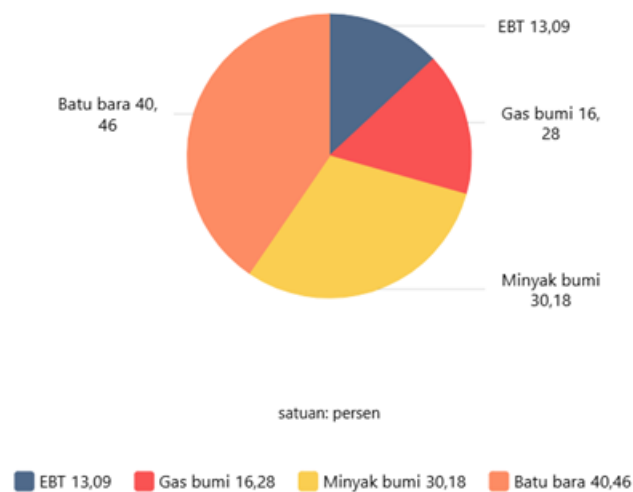
menurunkan emisi secara signifikan, *Paris Agreement* berlaku untuk semua negara. Namun, *Paris Agreement* tetap menggunakan prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR), sehingga negara berkembang memiliki ruang untuk menyesuaikan target penurunan emisi berdasarkan kemampuan dan kondisi nasional masing-masing (United Nations, 2015).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi terhadap energi fosil sekaligus rentan terhadap dampak perubahan iklim, memiliki posisi yang strategis namun penuh dilema dalam rezim iklim global. Indonesia secara resmi meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ratifikasi ini secara hukum mengikat Indonesia untuk menyusun NDC nasional dan menerjemahkan komitmen global tersebut ke dalam kebijakan energi nasional. Dalam NDC pertama, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen tersebut kemudian diperbarui melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) tahun 2022 menjadi 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional. Selain itu, Indonesia menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat (ENDC, 2022; IEA, 2022).

Penelitian ini perlu menegaskan bahwa fokus utama kajian adalah kebijakan luar negeri Indonesia, bukan evaluasi teknis terhadap kebijakan energi domestik. Komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* yang tercermin melalui NDC, keikutsertaan dalam forum COP, kerja sama *Just Energy Transition Partnership* (JETP), serta peran Indonesia dalam G20 dapat dipahami sebagai bentuk perilaku kebijakan luar negeri yang dapat diamati dan dianalisis. Sementara itu, kebijakan energi domestik seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 lebih berperan sebagai konteks. Artinya, kebijakan-kebijakan tersebut membantu membentuk batasan dan peluang bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia, bukan menjadi fokus utama yang dievaluasi dalam penelitian ini.

Secara struktural, upaya transisi energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Hingga tahun 2023, batu bara berkontribusi sebesar 40,46%, minyak bumi 30,18%, dan gas bumi 16,28% dari total bauran energi primer nasional

(ESDM, 2024). Sementara itu, realisasi bauran EBT baru mencapai 14,65% pada akhir 2024, masih jauh dari target 23% pada 2025 (ESDM, 2025). Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh faktor teknis seperti lambatnya proses lelang proyek dan kendala pendanaan, serta faktor ekonomi-politik yang lebih dalam (Simanjuntak, 2024).



**Gambar 1.** Bauran Energi Primer Indonesia 2023.

*Sumber Gambar 1: Katadata (2024) – berdasarkan data Kementerian ESDM*

Berdasarkan Gambar 1, data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi, yaitu batu bara dan minyak bumi mencakup lebih dari 70% bauran energi nasional. Selain menjadi konsumen dalam negeri, Indonesia juga berperan aktif sebagai salah satu pengekspor energi fosil terbesar di dunia dengan kontribusi mencapai 34,1% dari total ekspor global pada tahun 2023 (IBAI, 2024). Selain itu, produksi batu bara nasional bahkan meningkat hingga 8% pada 2024, mencapai 836 juta ton (ESDM, 2025). Dominasi ini diperkuat dengan alokasi subsidi fosil yang besar (USD 8,6 miliar) serta hambatan regulasi domestik seperti TKDN (Simanjuntak, 2021; Tempo, 2023). Ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil inilah yang membatasi ruang gerak

diplomasi Indonesia dan memicu kesenjangan antara komitmen global dengan realitas domestik, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Analisis Kesenjangan antara Komitmen dan Realisasi Transisi Energi di Indonesia

No	Aspek Pengamatan	Komitmen	Realisasi	Kesenjangan
1	Penurunan emisi gas rumah kaca	Penurunan emisi sebesar 29% melalui usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional berdasarkan NDC pertama Indonesia.	Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan secara proporsional.	Pelaksanaan kebijakan belum cukup kuat untuk mengejar komitmen internasional.
2	Bauran EBT	Target 23% porsi EBT dalam energi nasional pada tahun 2025.	Baru mencapai 14,65% pada akhir tahun 2024.	Terdapat kekurangan sekitar 8,35% yang harus dikejar.
3	Ketergantungan energi fosil	Komitmen untuk melakukan penurunan penggunaan batu bara/fosil secara bertahap.	Tingkat produksi dan konsumsi domestik justru masih menunjukkan tren meningkat.	Strategi transisi energi belum mampu menekan dominasi industri fosil di dalam negeri.

*Sumber: Diolah oleh penulis (2026)*

Kesenjangan antara komitmen dan realisasi yang terlihat pada Tabel 1 tidak hanya menjadi masalah kebijakan energi di dalam negeri. Dalam perspektif Hubungan Internasional, kondisi tersebut memiliki dampak yang cukup penting. Pertama, kondisi ini dapat memengaruhi kredibilitas Indonesia di tingkat internasional. Kedua, hal ini juga dapat menimbulkan biaya reputasi atau penurunan kepercayaan internasional, yang pada akhirnya melemahkan posisi Indonesia dalam negosiasi isu iklim global. Ketiga, kesenjangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan komitmen diplomasi jangka panjang. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan luar negeri.

Secara regulatif, Indonesia telah membangun landasan hukum yang cukup menyeluruh untuk mendukung transisi energi. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% dan membuka peluang bagi kerja sama internasional dalam pendanaan dan transfer teknologi (Republik Indonesia, 2014; 2017). Langkah ini diperkuat melalui Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yang menginstruksikan penghentian operasional PLTU secara bertahap. Di kancah internasional, aktifnya Indonesia dalam *Clean Energy Transitions Programme* (CETP) serta inisiasi skema JETP pada KTT G20 Bali 2022 mempertegas upaya Indonesia dalam memosisikan diri sebagai aktor yang responsif terhadap norma transisi energi global (IEA, 2022; ESDM, 2022).

Meskipun berbagai kajian telah menelaah kepatuhan Indonesia terhadap *Paris Agreement* dan dinamika politik energi di dalam negeri, kajian yang secara khusus melihat kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *foreign policy behavior* dalam isu EBT masih terbatas. Terutama, penelitian yang memetakan bagaimana perkembangan dan pola perilaku kebijakan luar negeri Indonesia dari waktu ke waktu masih jarang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana Indonesia menjalankan kebijakan luar negerinya di tingkat internasional dalam merespons komitmen *Paris Agreement* selama periode 2015–

2024. Analisis ini menggunakan kerangka *Foreign Policy Analysis* (FPA) dari Morin dan Paquin (2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejak disepakatinya *Paris Agreement* pada tahun 2015, isu transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi bagian penting dalam agenda global penanganan krisis iklim. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada energi fosil sekaligus telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendorong pengembangan EBT. Namun, dalam praktiknya, produksi dan konsumsi energi fosil di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga proses transisi energi berjalan relatif lambat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia dan realisasi pengembangan EBT di tingkat nasional. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pasca-ratifikasi *Paris Agreement* pada periode 2015–2024?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan ketentuan *Paris Agreement* yang berkaitan dengan sektor energi, terutama yang tercantum dalam Pasal 2, 4, 6, 9, dan 10.
2. Menganalisis kondisi dan perkembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai faktor domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia pasca-ratifikasi *Paris Agreement*.
3. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pada periode 2015–2024 sebagai bentuk *foreign policy behavior* berdasarkan pendekatan FPA.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam pengembangan pengetahuan di bidang studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai kebijakan luar negeri dan diplomasi energi dalam konteks perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang

kebijakan luar negeri negara berkembang dalam kerangka *Paris Agreement*, serta memberikan pemahaman mengenai hubungan antara komitmen global, kondisi domestik, dan perilaku kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) pada periode 2015–2024.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan sejumlah literatur yang relevan sebagai rujukan untuk membangun kerangka konseptual dan mengarahkan fokus analisis mengenai kebijakan luar negeri dan transisi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pasca-ratifikasi *Paris Agreement*. Literatur yang digunakan mencakup pembahasan mengenai kepatuhan terhadap komitmen iklim global, dinamika politik energi domestik, serta diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional.

Untuk memudahkan pemetaan, penelitian terdahulu dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kepatuhan Indonesia terhadap *Paris Agreement*, politik energi nasional, serta diplomasi iklim dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Kelompok pertama membahas mengenai sejauh mana Indonesia memenuhi komitmen penurunan emisi dalam kerangka *Paris Agreement*. Safitri dan Rohma (2024) menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi seperti RUEN, implementasinya masih terbatas (Safitri & Rohma, 2024). Temuan ini diperkuat oleh Ayuningsih dkk. (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan pendanaan, teknologi, serta koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama (Ayuningsih dkk., 2023).

Hasyim dkk. (2024) menggambarkan bahwa komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* dipengaruhi oleh kombinasi kepentingan nasional dan tekanan norma internasional (Hasyim dkk., 2024). Sementara itu, Arisanti (2017) menekankan bahwa ratifikasi perjanjian tersebut juga didorong oleh upaya memperoleh akses terhadap pendanaan dan teknologi hijau serta membangun citra positif Indonesia di tingkat internasional (Arisanti, 2017). Selain itu, Wahyudi (2023) menambahkan bahwa ketergantungan pada batu bara dan lemahnya komitmen politik menjadi hambatan utama dalam pencapaian target iklim (Wahyudi, 2023).

Secara umum, literatur dalam kelompok ini menekankan aspek kepatuhan dan implementasi domestik, tetapi belum secara spesifik menjelaskan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam perilaku kebijakan luar negeri.

Kelompok kedua menyoroti faktor ekonomi politik yang memengaruhi arah

transisi energi di Indonesia. Herindrasti (2022) menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil masih kuat sehingga membatasi transformasi energi (Herindrasti, 2022). Selanjutnya, Mudhoffar dan Magriasti (2024) menekankan bahwa transisi energi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik yang masih berorientasi pada energi fosil (Mudhoffar & Magriasti, 2024).

Temuan serupa dikemukakan oleh Supriyanto (2024), yang menyatakan bahwa lemahnya kemauan politik pemerintah menjadi faktor utama lambatnya pengembangan energi baru dan terbarukan (Supriyanto, 2024). Adrian dkk. (2023) dan Manahara dkk. (2023) juga menemukan adanya kesenjangan antara potensi EBT dan realisasinya, yang dipengaruhi oleh hambatan regulasi dan infrastruktur (Adrian dkk., 2023; Manahara dkk., 2023). Selain itu, Kamisuna (2024) mengungkap adanya kontradiksi dalam kebijakan energi Indonesia, di mana upaya dekarbonisasi berjalan beriringan dengan pembangunan PLTU baru (Kamisuna, 2024).

Massagony dkk. (2025) menegaskan bahwa dominasi aktor ekonomi di sektor fosil serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi hambatan utama dalam mencapai target *net zero emissions* (Massagony dkk., 2025). Selain itu, Aditya dkk. (2025) menambahkan adanya berbagai kendala struktural seperti kesenjangan infrastruktur, ketidakstabilan kebijakan, serta rendahnya kepercayaan investor, meskipun terdapat peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja hijau dan peningkatan investasi asing (Aditya dkk., 2025).

Secara keseluruhan, literatur dalam kelompok ini berfokus pada dimensi domestik dan ekonomi politik energi, tetapi belum mengaitkannya secara sistematis dengan kebijakan luar negeri.

Kelompok ketiga membahas diplomasi iklim dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons komitmen global perubahan iklim. Koreshi dkk. (2025) menemukan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia cenderung bersifat pragmatis akibat dilema antara kepentingan ekonomi domestik dan komitmen internasional (Koreshi dkk., 2025). Gaora dkk. (2023) menekankan bahwa diplomasi iklim Indonesia masih berorientasi pada kepentingan pembangunan ekonomi dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan iklim (Gaora dkk., 2023).

Rahman (2013) dan Afrizal (2019) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara tekanan internasional dan kepentingan domestik (Rahman, 2013; Afrizal, 2019). Nofansya dkk. (2023) secara khusus menyoroti dilema antara kepentingan ekonomi dan komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Nofansya dkk., 2023).

Wijanarka dan Dewi (2024) menggambarkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional seperti *South-South and Triangular Cooperation* (SSTC) melalui proyek CASE merupakan upaya diplomasi energi bersih (Wijanarka & Dewi, 2024). Herindrasti dkk. (2022) juga menemukan bahwa meskipun Indonesia aktif dalam forum internasional, konsistensi kebijakan domestik masih menjadi tantangan bagi efektivitas diplomasi EBT (Herindrasti, 2022).

**Tabel 2.** Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Teori/Penekatan	Temuan Utama	Celah bagi Penelitian Ini
1	Safitri & Rohma (2024)	Kepatuhan sektor pembangkit listrik (2016–2020).	<i>Mitchell's Compliance Theory</i>	Meski terdapat regulasi RUEN, pelaksanaan masih terbatas dan belum memenuhi target.	Menyoroti jarak antara komitmen dan pelaksanaan kebijakan energi di lapangan.
2	Herindrasti (2022)	Posisi Indonesia dalam tata kelola	Geopolitik Energi	Indonesia terjebak ketergantungan fosil, sehingga	Memberikan perspektif posisi strategis Indonesia dalam

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Teori/Pen dekatan	Temuan Utama	Celah bagi Penelitian Ini
		energi global.		kebijakan belum memperkuat posisi geopolitik.	peta kekuatan energi global.
3	Koreshi dkk. (2025)	Dinamika kebijakan luar negeri dalam isu iklim.	Kepentinga n Nasional	KLN cenderung reaktif dan pragmatis; isu iklim sering dijadikan alat diplomasi semata.	Menggambarka n ketidakkonsiste nan politik luar negeri dalam mendorong transisi energi.
4	Gaora dkk. (2023)	Diplomasi iklim Indonesia era pemerintah n Joko Widodo.	<i>Eclectic Approach (FPA, Environme ntal Diplomacy)</i>	Diplomasi berorientasi ekonomi; retorika hijau tidak diikuti aksi nyata.	Menegaskan sifat simbolik diplomasi iklim.
5	Mudhoffar & Magriasti (2024)	Ekonomi politik energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia	Ekonomi Politik	Transisi dipengaruhi struktur ekonomi politik yang berorientasi pada energi fosil.	Menunjukkan hambatan struktur ekonomi dalam negeri.

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Teori/Pendekatan	Temuan Utama	Celah bagi Penelitian Ini
6	Supriyanto (2024)	Politik di balik kebijakan energi baru dan terbarukan (EBT)	<i>Political Economy</i>	Lemahnya <i>political will</i> menjadi faktor utama lambatnya pengembangan EBT.	Menyoroti fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi daripada komitmen emisi karbon.
7	Ayuningsih dkk. (2023)	Implementasi NDC Indonesia dalam kerangka <i>Paris Agreement</i> .	<i>International Regime Theory</i>	Hambatan berupa pendanaan, teknologi, dan koordinasi antarlembaga.	Memberikan data teknis kendala implementasi NDC.
8	Adrian dkk. (2023)	Transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT)	Trilema Energi	Kesenjangan besar antara potensi EBT dan realisasi pemanfaatan .	Menekankan sulitnya menyeimbangkan energi berkelanjutan.
9	Nofansyah dkk. (2023)	Pengurangan emisi karbon	Kebijakan Luar Negeri, Ekonomi Hijau	KLN berfokus pada kepentingan ekonomi pragmatis (ekspor fosil).	Menunjukkan benturan kepentingan ekspor vs emisi.

<b>No</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Teori/Pendekatan</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Celah bagi Penelitian Ini</b>
10	Manahara dkk. (2023)	Tantangan transisi energi baru dan terbarukan (EBT)	Studi Kasus	Implementasi menghadapi kendala regulasi dan perizinan lokal.	Memberikan gambaran tantangan pada level proyek.
11	Kamisuna (2024)	Kontradiksi dekarbonisasi sektor listrik	Analisis Kebijakan	Dekarbonisasi berjalan beriringan dengan pembangunan PLTU baru.	Menyoroti pengaruh aktor eksternal (Jepang/Tiongkok).
12	Rahman (2013)	Diplomasi iklim Indonesia	Pendekatan Eklektik	Kebijakan iklim bersifat ambivalen demi reputasi internasional	Menunjukkan akar historis perilaku luar negeri Indonesia.
13	Aditya dkk. (2025)	Peluang dan tantangan EBT menuju 2060	Kualitatif & Kuantitatif	Ketidakstabilan kebijakan dan rendahnya kepercayaan investor.	Mengidentifikasi peluang investasi asing dan peta jalan.
14	Massagony dkk. (2025)	Ekonomi politik kebijakan energi	Ekonomi Politik	Kebijakan didominasi aktor dengan kepentingan	Menegaskan perlunya perubahan

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Teori/Pen dekatan	Temuan Utama	Celah bagi Penelitian Ini
				ekonomi fosil.	struktur kekuasaan.
15	Herindrast i dkk. (2024)	Perbandinga n kebijakan EBT	<i>Geopolitics of Energy</i>	Diplomasi lingkungan tidak diimbangi konsistensi kebijakan nasional.	Menunjukkan posisi komparatif Indonesia di kawasan.
16	Hasyim dkk. (2024)	Komitmen RI terhadap Perjanjian Paris	<i>Foreign Policy dan Regime Theory</i>	Ratifikasi didorong kombinasi kepentingan nasional & norma global.	Menyoroti hambatan struktural pasca- ratifikasi.
17	Wijanarka & Dewi (2024)	Peran pemerintah dalam transisi energi	Teori Hijau	Pemanfaatan kerja sama multi-aktor untuk energi bersih.	Mengidentifikas i peran aktor non-negara (GIZ/Bappenas)
18	Arisanti (2017)	Kepentinga n nasional Indonesia	<i>Foreign Policy Analysis (FPA)</i>	Motivasi ratifikasi adalah akses dana dan citra positif.	Menegaskan diplomasi sebagai instrumen reputasi.
19	Afrizal (2019)	Kebijakan luar negeri Indonesia dan	<i>Two-Level Game</i>	KLN adalah hasil interaksi tekanan	Memperlihatkan isu lingkungan sebagai sarana strategis.

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Teori/Pen dekatan	Temuan Utama	Celah bagi Penelitian Ini
		lingkungan global		internasional dan domestik.	
20	Wahyudi (2023)	Hambatan implementa si <i>Paris</i> <i>Agreement</i>	Teori Hijau & Rezim Internasion al	Kendala struktural batu bara dan komitmen politik lemah.	Menjelaskan pengaruh faktor domestik pada janji global.

*Sumber : Diolah oleh penulis (2026)*

Berdasarkan analisis terhadap dua puluh penelitian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada transisi energi Indonesia dari sisi teknis, seperti kepatuhan terhadap target, hambatan ekonomi dan politik dalam negeri, atau diplomasi iklim secara umum. Namun, kajian yang secara khusus dan sistematis memetakan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *foreign policy behavior* dalam isu EBT masih terbatas. Secara lebih spesifik, penelitian yang memetakan tiga fase perkembangan dan empat pola kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT periode 2015–2024 berdasarkan kerangka *Foreign Policy Analysis* (FPA) Morin dan Paquin masih belum banyak ditemukan.

Sebagai perbandingan, Safitri dan Rohma (2024) lebih menekankan pada aspek kepatuhan energi di tingkat dalam negeri tanpa menganalisis perilaku kebijakan luar negeri. Sementara itu, Koreshi dkk. (2025) membahas diplomasi iklim Indonesia, tetapi masih bersifat umum dan belum mengidentifikasi pola maupun fase kebijakan secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana Indonesia menampilkan perilaku kebijakan luar negerinya dalam merespons komitmen *Paris Agreement* pada periode 2015–2024. Fokus utama penelitian ini adalah pada tindakan Indonesia di tingkat internasional. Penelitian ini

bertujuan untuk melampaui deskripsi umum mengenai respons Indonesia, dengan memetakan pola kebijakan luar negeri secara lebih terstruktur. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana komitmen internasional memengaruhi perilaku kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT pada periode 2015–2024.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori *Foreign Policy Analysis***

Teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) merupakan salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang digunakan untuk memahami kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau perilaku negara di tingkat internasional. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap teori-teori besar dalam Hubungan Internasional, seperti realisme dan liberalisme, yang cenderung melihat negara sebagai aktor rasional dan seragam dalam sistem internasional. Berbeda dari pendekatan tersebut, FPA berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri dibentuk, diproses, dan diwujudkan dalam praktik.

Salah satu tokoh awal dalam pengembangan FPA adalah James N. Rosenau, yang menjelaskan bahwa untuk memahami kebijakan luar negeri, kita perlu “membuka kotak hitam negara” (*opening the black box*). Artinya, kebijakan luar negeri tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu respons terhadap sistem internasional, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kondisi domestik, situasi internasional, serta konteks yang dihadapi negara pada waktu tertentu (Rosenau, 1966, sebagaimana dikutip dalam Starr, 1988).

Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh Valerie M. Hudson, yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan hasil dari tindakan para aktor politik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Hudson menekankan bahwa kebijakan luar negeri dapat diamati melalui tindakan negara dan bukan hanya melalui dokumen atau pernyataan resmi, sehingga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola perilaku negara dari waktu ke waktu (Hudson, 2005). Lebih lanjut, Hudson juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan

berbagai faktor pada tingkat individu, domestik, dan internasional. Dengan demikian, negara tidak dipandang sebagai aktor abstrak, melainkan sebagai representasi dari keputusan para pengambil kebijakan di dalamnya (Hudson, 2014).

Dalam penelitian ini, kerangka utama yang digunakan adalah FPA dari Jean-François Morin dan Marc Paquin (2018). Morin dan Paquin mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai seperangkat tindakan dan aturan yang dijalankan oleh otoritas politik suatu negara dalam lingkungan internasional. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai *foreign policy behavior*, yaitu perilaku yang dapat diamati dan dianalisis untuk melihat arah serta konsistensi kebijakan suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT sebagai eksplanandum, yaitu fenomena utama yang dijelaskan melalui tindakan Indonesia di tingkat internasional dalam merespons komitmen *Paris Agreement* selama periode 2015–2024 (Morin & Paquin, 2018).

Untuk menerapkan pendekatan ini, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk perilaku kebijakan luar negeri Indonesia yang dapat diamati. Perilaku tersebut mencakup komitmen formal di tingkat internasional, seperti ratifikasi *Paris Agreement* dan penyampaian NDC/ENDC, posisi Indonesia dalam forum internasional seperti COP dan G20, keterlibatan dalam kerja sama internasional di bidang EBT, serta pemanfaatan forum global untuk mendorong agenda transisi energi. Berbagai bentuk tindakan ini kemudian dianalisis untuk melihat pola dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam penelitian ini, indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai alat analisis utama dan akan digunakan dalam Bab IV untuk mengklasifikasikan tindakan Indonesia ke dalam beberapa fase perkembangan dan pola perilaku kebijakan luar negeri. Dengan demikian, pendekatan FPA di sini akan menjadi landasan teori serta menjadi dasar dalam proses analisis data.

Selain mengidentifikasi perilaku, penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan dan norma internasional yang berasal dari rezim perubahan iklim, kepentingan ekonomi dalam negeri yang masih bergantung pada energi fosil, kapasitas kelembagaan dalam mengelola transisi energi, serta peran kepemimpinan

politik dalam menentukan arah kebijakan. Faktor-faktor ini digunakan untuk memahami mengapa kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan pola tertentu dalam periode yang diteliti.

Dalam penelitian ini, konsep rezim internasional digunakan sebagai kerangka pendukung untuk menjelaskan konteks eksternal yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Rezim internasional dipahami sebagai seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang membentuk perilaku negara dalam suatu isu global (Krasner, 1982). Pada isu perubahan iklim, *Paris Agreement* sebagai bagian dari rezim iklim global tidak hanya memberikan tekanan, tetapi juga menjadi pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakannya.

Lebih lanjut, tata kelola perubahan iklim global di sini tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai rezim yang saling terhubung atau dikenal sebagai *regime complex* (Keohane & Victor, 2010). Kondisi ini menciptakan ruang sekaligus tekanan bagi negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rezim internasional digunakan untuk menjelaskan mengapa Indonesia perlu merespons komitmen global, sementara FPA digunakan untuk menganalisis bagaimana respons tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

Penelitian ini menggunakan level analisis negara, di mana pemerintah Indonesia dianggap sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negeri. Meskipun teori FPA pada dasarnya banyak menekankan peran individu sebagai pengambil keputusan, penelitian ini memilih pendekatan pada level negara agar analisis tetap terfokus pada pola kebijakan secara keseluruhan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa faktor-faktor struktural, seperti kondisi ekonomi dan sumber daya alam, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri (Neack et al., 1995).

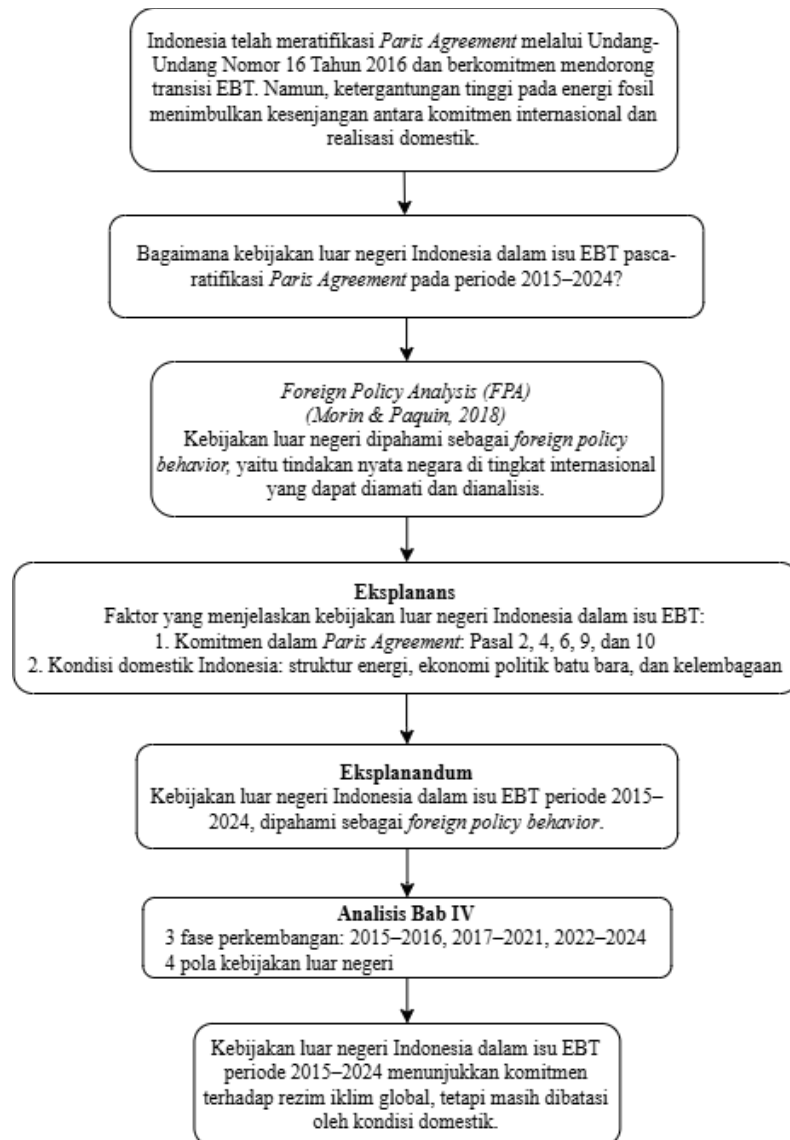
Selain itu, penggunaan level analisis negara juga bertujuan untuk menjaga fokus penelitian pada gambaran besar kebijakan. Analisis yang terlalu mendalam terhadap aspek individu, seperti karakter atau preferensi personal pengambil keputusan, berpotensi memperumit pembahasan dan mengaburkan fokus utama penelitian (Hudson, 2007). Dengan demikian, penelitian ini melihat kebijakan luar negeri sebagai representasi dari posisi resmi negara, bukan sebagai hasil dari dinamika antar individu di dalam pemerintahan.

Pemilihan level ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola perilaku kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih sistematis dalam rentang waktu tertentu, yaitu periode 2015–2024. Oleh karena itu, penelitian ini tidak secara khusus membahas perbedaan pandangan antaraktor domestik, melainkan menempatkan negara sebagai satu kesatuan dalam merespons tekanan dan norma internasional.

Dengan demikian, penelitian ini secara tegas menempatkan *Foreign Policy Analysis* sebagai kerangka utama untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia sebagai perilaku yang dapat diamati, sementara konsep rezim internasional digunakan untuk menjelaskan tekanan dan norma global yang memengaruhi perilaku tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana tindakan tersebut terbentuk dalam rezim perubahan iklim global.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Bagian ini menjelaskan alur berpikir penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pasca-ratifikasi *Paris Agreement* pada periode 2015–2024. Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara komitmen internasional Indonesia dan kondisi domestik. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan berkomitmen untuk mendorong transisi EBT. Namun, dalam praktiknya Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batu bara. Kondisi ini menggambarkan bahwa komitmen Indonesia di tingkat internasional belum sepenuhnya sejalan dengan realisasi di dalam negeri.



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran Penelitian.

*Sumber: Diolah oleh Penulis untuk kebutuhan penelitian*

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan pada Gambar 2, penelitian ini menggunakan pendekatan *Foreign Policy Analysis* (FPA) dari Morin dan Paquin untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT. Dalam pendekatan ini, kebijakan luar negeri dipahami sebagai *foreign policy behavior*, yaitu tindakan negara di tingkat internasional yang dapat diamati dan dianalisis.

Dalam kerangka pemikiran ini, terdapat dua faktor utama yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua faktor tersebut disebut sebagai eksplanans. Faktor pertama adalah komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*, khususnya Pasal 2, 4, 6, 9, dan 10. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan tujuan pengendalian perubahan iklim, penyampaian dan pembaruan NDC, kerja sama internasional, pendanaan iklim, serta transfer teknologi. Faktor kedua adalah kondisi domestik Indonesia, seperti struktur energi nasional, ekonomi politik batu bara, dan kapasitas kelembagaan. Kondisi domestik dalam penelitian ini diposisikan sebagai eksplanans, yaitu faktor penjelas yang memengaruhi arah dan keterbatasan kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, kondisi domestik tidak hanya dipahami sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai faktor yang membantu menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT menunjukkan pola tertentu.

Sementara itu, hal utama yang dijelaskan dalam penelitian ini disebut sebagai eksplanandum. Eksplanandum dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT periode 2015–2024, yang dipahami sebagai *foreign policy behavior*. Kebijakan luar negeri tersebut diamati melalui tindakan Indonesia di tingkat internasional, seperti ratifikasi *Paris Agreement*, penyampaian dan pembaruan NDC/ENDC, partisipasi dalam forum UNFCCC, COP, dan G20, serta keterlibatan dalam kerja sama internasional seperti JETP, CASE, dan SSTC.

Kerangka pemikiran ini juga menjadi dasar penyusunan analisis pada Bab IV. Analisis dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase komitmen formal dan kepatuhan awal pada 2015–2016, fase penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap pada 2017–2021, serta fase akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan pada 2022–2024. Dari ketiga fase tersebut, penelitian ini kemudian mengidentifikasi empat pola kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi domestik, dominasi pendekatan multilateral, ketergantungan pada pendanaan dan kerja sama internasional, serta kebijakan yang adaptif dan bertahap.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT tidak hanya dipengaruhi oleh

komitmen dalam *Paris Agreement*, tetapi juga oleh kondisi domestik yang membentuk ruang gerak dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pasca-ratifikasi *Paris Agreement* pada periode 2015–2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pola tindakan kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercermin dalam praktik dan dokumen resmi negara. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial melalui pengumpulan data dalam konteks alamiah dan analisis secara induktif, dengan penekanan pada makna dan proses yang terjadi (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk membaca kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara (*foreign policy behavior*) yang dapat diamati melalui pelaksanaannya di tingkat internasional.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan Indonesia sebagai aktor negara yang dianalisis dari perspektif kebijakan luar negeri di sektor EBT pasca-ratifikasi *Paris Agreement*. Studi kasus dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang spesifik berdasarkan isu, periode, dan komitmen internasional tertentu.

Selain itu, penelitian ini menetapkan unit analisis dan satuan pengamatan untuk memperjelas fokus kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT pasca-ratifikasi *Paris Agreement* pada periode 2015–2024. Unit analisis ini dipahami sebagai *foreign policy behavior*, yaitu tindakan negara yang dapat diamati di tingkat internasional dalam merespons komitmen global di bidang perubahan iklim dan transisi energi.

Sementara itu, satuan pengamatan dalam penelitian ini mencakup tindakan-tindakan konkret Indonesia di tingkat internasional selama periode 2015–2024. Tindakan tersebut meliputi ratifikasi *Paris Agreement*, penyampaian dan pembaruan NDC/ENDC, pernyataan resmi dalam forum internasional seperti COP dan G20, serta keterlibatan dalam kerja sama internasional seperti JETP, CETP-IEA, CASE, dan SSTC. Selain itu, dokumen resmi pemerintah Indonesia dan

lembaga internasional yang berkaitan dengan *Paris Agreement* dan transisi energi juga menjadi bagian dari satuan pengamatan dalam penelitian ini.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pasca-ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kebijakan luar negeri dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku kebijakan luar negeri (*foreign policy behavior*), yaitu tindakan pemerintah Indonesia di tingkat internasional.

Penelitian ini secara khusus menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia yang tercermin dalam berbagai tindakan internasional terkait komitmen *Paris Agreement*, khususnya Pasal 2, 4, 6, 9, dan 10. Ketentuan tersebut mencakup tujuan pengendalian perubahan iklim, komitmen penurunan emisi melalui NDC, mekanisme kerja sama internasional, dukungan pendanaan iklim, serta pengembangan dan transfer teknologi ramah lingkungan.

Dengan menggunakan pendekatan FPA, penelitian ini berfokus pada bentuk, pola, dan orientasi perilaku kebijakan luar negeri Indonesia, dan bukan pada keseluruhan proses pengambilan keputusan maupun aspek teknis proyek EBT. Aktor utama yang dianalisis adalah pemerintah Indonesia sebagai representasi negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2015–2024, yang dibagi ke dalam tiga tahap analisis, yaitu fase komitmen formal dan kepatuhan awal (2015–2016), fase penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap (2017–2021), serta fase akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan (2022–2024). Batasan waktu ini penulis gunakan untuk melihat perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia secara bertahap dalam merespons komitmen global di bidang EBT.

### 3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana tercermin dalam dokumen resmi dan laporan institusional. Melalui dokumen-dokumen tersebut,

penulis dapat mengamati tindakan nyata Indonesia di tingkat internasional yang berkaitan dengan isu energi baru dan terbarukan (EBT) dan komitmen terhadap *Paris Agreement*.

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen resmi pemerintah Indonesia, seperti ENDC, RUEN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi *Paris Agreement*, serta peraturan presiden yang berkaitan dengan transisi energi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen dari lembaga internasional yang memiliki otoritas dalam isu perubahan iklim dan energi, seperti UNFCCC, IEA, dan IPCC, termasuk dokumen yang berkaitan dengan JETP dan berbagai bentuk kerja sama internasional lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan publikasi dari lembaga nasional dan non-pemerintah yang relevan, seperti Kementerian ESDM, Bappenas, dan IESR. Untuk memperkuat analisis, literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian terdahulu, serta artikel dari media yang kredibel turut dijadikan sebagai sumber data pendukung.

Dokumen dalam penelitian ini dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan topik penelitian, tingkat kepercayaan sumber, serta relevansinya terhadap fokus kajian. Agar data yang digunakan tetap relevan dan kredibel, dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, dokumen yang menjadi objek analisis utama merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2024. Tahun 2015 digunakan sebagai titik awal karena *Paris Agreement* disepakati pada COP21, sedangkan tahun 2016 menjadi titik ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dokumen ini merupakan bentuk dari tindakan Indonesia di tingkat internasional dalam isu EBT. Kedua, dokumen memiliki relevansi dengan substansi yaitu secara jelas mengaitkan Indonesia dengan *Paris Agreement*, transisi energi, atau kerja sama EBT. Ketiga, dokumen yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel, yaitu berupa dokumen yang berasal dari institusi resmi pemerintah, organisasi internasional yang diakui, atau lembaga penelitian lainnya. Kemudian, untuk literatur pendukung seperti buku dan artikel akademik yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dan tinjauan pustaka, tidak dibatasi oleh periode waktu

tertentu, selama tetap relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data primer seperti wawancara karena fokus analisis terletak pada dokumen resmi yang telah tersedia dan dinilai memadai untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara menyeluruh.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

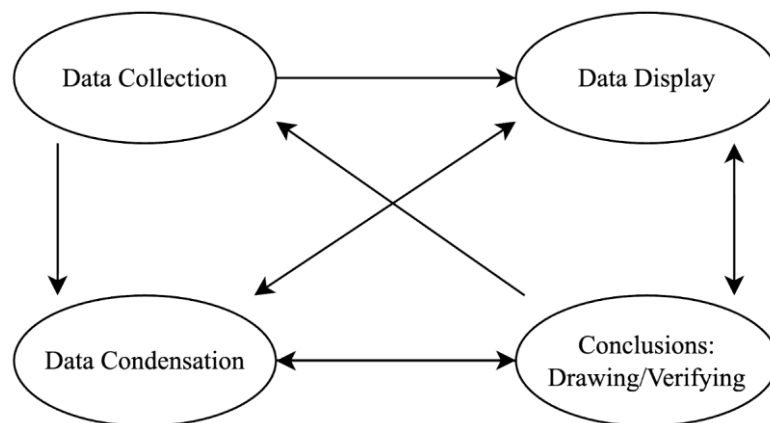
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selanjutnya, kedua teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penulis melakukan identifikasi terhadap dokumen kebijakan nasional dan internasional yang relevan dengan isu EBT dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kedua, dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan berdasarkan periode penelitian, yaitu 2015–2024, serta berdasarkan jenis tindakan kebijakan luar negeri, seperti komitmen formal, partisipasi dalam forum internasional, kerja sama internasional, pendanaan iklim, dan transfer teknologi. Ketiga, penulis melakukan penelaahan isi dokumen secara mendalam untuk mengidentifikasi bentuk *foreign policy behavior* Indonesia yang sesuai dengan fokus penelitian. Keempat, penulis mengelompokkan data berdasarkan pasal-pasal dalam *Paris Agreement* yang relevan serta jenis tindakan kebijakan luar negeri Indonesia. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan hubungan antara komitmen internasional, kondisi domestik, dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur akademik, seperti jurnal ilmiah dan buku, serta laporan dari lembaga internasional seperti UNFCCC dan IEA. Pendekatan ini sejalan dengan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Sugiyono (2013) dan Creswell (2014), yang menekankan pentingnya penggunaan sumber-sumber tertulis dalam memahami fenomena sosial dan kebijakan (Sugiyono, 2013; Creswell, 2014).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles dkk., 2014).



**Gambar 3.** Komponen analisis data: *interactive model*.

*Sumber: Miles, Huberman, dan Saldaña (2014)*

Pertama, kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, lalu menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles dkk., 2014). Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi berbagai tindakan Indonesia di tingkat internasional yang merupakan bentuk dari *foreign policy behavior* dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) selama periode 2015–2024. Untuk memudahkan analisis, data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan dimensi utama dalam *Paris Agreement*, yaitu Pasal 2, 4, 6, 9, dan 10.

Selanjutnya, data juga dikelompokkan berdasarkan tipe tindakan kebijakan luar negeri yang meliputi komitmen formal berupa ratifikasi dan penyampaian NDC/ENDC, partisipasi dalam forum internasional, keterlibatan dalam kerja sama internasional, upaya memperoleh pendanaan iklim, serta pengembangan dan transfer teknologi. Pada tahap lanjutan, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam tiga fase perkembangan, yaitu fase komitmen formal dan kepatuhan awal (2015–2016), fase penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap (2017–2021), serta fase akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan (2022–2024). Temuan tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi empat pola perilaku kebijakan luar negeri Indonesia. Pengelompokan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana

data yang telah diseleksi dan disusun kemudian ditafsirkan menjadi temuan analitis dalam Bab IV.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menampilkan data yang telah dianalisis dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur (Miles dkk., 2014). Penyajian data disusun berdasarkan periode waktu dan kategori tindakan kebijakan luar negeri agar memudahkan pembaca dalam memahami pola dan perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, Tabel 3 mengenai kerangka analisis kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan ketentuan *Paris Agreement* digunakan sebagai alat bantu analisis yang menghubungkan setiap pasal dengan indikator *foreign policy behavior*. Tabel ini dirujuk dalam bab metode dan digunakan dalam analisis pada bab IV.

Selanjutnya, tahapan terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, temuan penelitian ditafsirkan dengan mengaitkannya pada kerangka FPA Morin dan Paquin. Analisis diarahkan untuk memahami interaksi antara tekanan internasional dan kepentingan domestik yang memengaruhi perilaku kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana komitmen internasional dan kondisi domestik sebagai eksplanans memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai eksplanandum. Proses verifikasi dilakukan secara berulang dengan meninjau kembali data dan temuan yang ada untuk memastikan konsistensi serta validitas hasil penelitian (Miles dkk., 2014).

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu energi baru dan terbarukan (EBT) pasca-ratifikasi *Paris Agreement* periode 2015–2024 memperlihatkan upaya Indonesia untuk menempatkan diri sebagai negara yang mendukung rezim iklim global. Hal ini terlihat melalui ratifikasi *Paris Agreement*, penyampaian NDC, pembaruan Updated NDC dan ENDC, partisipasi dalam forum COP dan G20, serta keterlibatan dalam kerja sama transisi energi seperti JETP. Dengan menggunakan pendekatan *Foreign Policy Analysis* (FPA), tindakan-tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *foreign policy behavior*, yaitu perilaku kebijakan luar negeri yang dapat diamati melalui tindakan negara di tingkat internasional (Hudson, 2014; Morin & Paquin, 2018).

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap *Paris Agreement*. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan strategi Indonesia untuk menyesuaikan tuntutan rezim iklim global dengan kondisi domestik yang masih kompleks. Indonesia menunjukkan komitmen di tingkat internasional, tetapi pada saat yang sama masih menghadapi ketergantungan terhadap energi fosil, kebutuhan menjaga pasokan listrik, keterbatasan investasi, kebutuhan teknologi, serta koordinasi antaraktor dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT terbentuk melalui tarik-menarik antara komitmen global dan kemampuan domestik.

Perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT berlangsung secara bertahap. Pada 2015–2016, Indonesia berada pada fase komitmen formal dan kepatuhan awal. Pada 2017–2021, Indonesia mulai memasuki fase penyesuaian kebijakan dan kepatuhan bertahap. Sementara itu, pada 2022–2024, Indonesia mulai bergerak menuju fase akselerasi kerja sama dan diplomasi pendanaan. Perubahan ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat statis, tetapi terus menyesuaikan diri dengan meningkatnya tekanan rezim iklim global dan kebutuhan domestik dalam transisi energi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT membentuk empat pola utama. Keempat pola tersebut mencakup kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi domestik, dominasi pendekatan multilateral, ketergantungan pada pendanaan dan kerja sama internasional, serta kebijakan yang adaptif dan bertahap. Pola-pola ini menandakan bahwa Indonesia tidak menolak agenda transisi energi global, tetapi menjalankannya dengan cara yang menyesuaikan kemampuan dan kepentingan domestik.

Dengan demikian, makna utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT bersifat adaptif, multilateral, dan bertahap. Indonesia menggunakan kebijakan luar negeri untuk menunjukkan komitmen terhadap rezim iklim global, menjaga citra sebagai negara yang kooperatif, serta memperoleh dukungan pendanaan, teknologi, dan kerja sama internasional. Namun, kredibilitas Indonesia dalam rezim iklim global tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang disampaikan di forum internasional, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia menunjukkan kemajuan nyata dalam transisi EBT di dalam negeri. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu EBT sangat bergantung pada kemampuan negara menyelaraskan diplomasi internasional dengan realisasi domestik.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kesesuaian antara komitmen internasional dan realisasi kebijakan domestik. Komitmen yang disampaikan Indonesia dalam forum internasional, seperti COP, G20, dan kerja sama JETP, perlu diikuti dengan langkah yang lebih nyata dalam pengembangan EBT di tingkat nasional. Hal ini penting agar posisi Indonesia dalam diplomasi iklim tetap dipercaya oleh negara lain dan tidak hanya terlihat kuat dalam retorika, tetapi juga dalam pelaksanaan.

Pemerintah juga perlu memiliki strategi diplomasi energi yang lebih jelas dan terarah. Strategi tersebut tidak cukup hanya berupa keikutsertaan dalam forum internasional, tetapi perlu diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pendanaan, teknologi, dan kerja sama transisi energi. Dalam hal ini,

Indonesia perlu memastikan bahwa kerja sama internasional, termasuk JETP dan kerja sama teknologi lainnya, benar-benar mendukung kepentingan nasional dan tidak menambah beban baru bagi negara.

Selain itu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan yang terlalu besar pada pendanaan luar negeri. Dukungan internasional memang penting, tetapi pemerintah juga perlu memperkuat sumber pembiayaan domestik dan mendorong investasi EBT di dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan transisi energi tidak terlalu bergantung pada komitmen negara mitra atau lembaga keuangan internasional yang dapat berubah sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi global.

Koordinasi antarlembaga pemerintah juga perlu diperkuat, terutama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Bappenas, PLN, dan lembaga lain yang terlibat dalam transisi energi. Koordinasi ini penting agar posisi Indonesia di tingkat internasional sejalan dengan kebijakan energi di dalam negeri. Dengan koordinasi yang lebih baik, kesenjangan antara komitmen internasional dan realisasi domestik dapat dikurangi.

Dari sisi akademis, penelitian selanjutnya dapat membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan negara berkembang lain, khususnya negara-negara ASEAN, dalam isu EBT dan perubahan iklim. Perbandingan tersebut dapat membantu melihat apakah pola kebijakan luar negeri Indonesia merupakan pola yang khas atau juga dialami oleh negara berkembang lain. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data primer, seperti wawancara dengan pemerintah, akademisi, lembaga internasional, atau organisasi masyarakat sipil, agar proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dapat dijelaskan secara lebih mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, I. A., Wijayanto, T., & Hakam, D. F. (2025). Advancing renewable energy in Indonesia: A comprehensive analysis of challenges, opportunities, and strategic solutions. *Sustainability*, *17*(5), 2216. <https://doi.org/10.3390/su17052216>
- Adrian, M., Purnomo, E. P., Enrici, A., & Khairunnisa, T. (2023). Energy transition towards renewable energy in Indonesia. *Heritage and Sustainable Development*, *5*(1), 107–118. <https://doi.org/10.37868/hsd.v5i1.108>
- Afrizal. (2019). Politik luar negeri Indonesia era Joko Widodo dalam isu lingkungan global. *Prosiding Konvensi Nasional X Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)*. <https://aihii.or.id/prosiding-vennas-10/politik-luar-negeri-indonesia-era-joko-widodo-dalam-isu-lingkungan-global/>
- Andhika, M. D., Masyita, N., & Kusuma, A. M. (2026). Analisis Penurunan Input Energi Alam di Indonesia: Dampak Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 dan Implikasi untuk Transisi Energi. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, *6*(1), 43-54.
- Arisanti, D. (2017). *Politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global: Studi kasus kepentingan Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].
- Ayuningsih, A. N., Oktaviani, M. A., Chandra, A., Athyah, N., Manda M., P. D., Citra, Z., & Sulaiman, S. D. (2023a). Ratifikasi Paris Agreement dan pengaplikasian nationally determined contribution (NDC) Indonesia. *JISIP*

*UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 60–69.

<https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.21859>

- Bolan, S., Padhye, L. P., Jasemizad, T., Govarthan, M., Karmegam, N., Wijesekara, H., Amarasiri, D., Hou, D., Zhou, P., Biswal, B. K., Balasubramanian, R., Wang, H., Siddique, K. H. M., Rinklebe, J., Kirkham, M. B., & Bolan, N. (2024). Impacts of climate change on the fate of contaminants through extreme weather events. *Science of The Total Environment*, 909, 168388. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168388>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- ENDC. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*.
- ESDM. (2018). *Urgensi perubahan iklim dalam Dialog Talanoa: Indonesia menuju COP24 UNFCCC*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-perubahan-iklim-dalam-dialog-talanoa-indonesia-menuju-cop24-unfccc>
- ESDM. (2020). *Teken investasi Rp314 triliun, ini rincian kerja sama bidang energi PEA-Indonesia*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tekn-investasi-rp314-triliun-ini-rincian-kerja-sama-bidang-energi-pea-indonesia>
- ESDM. (2022). *Pemimpin negara G20 sepakati Deklarasi Bali, ini poin penting kesepakatan sektor energi*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/pemimpin-negara-g20-sepakati-deklarasi-bali-ini-poin-penting-kesepakatan-sektor-energi-1>

- ESDM. (2024, Januari 18). *Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT*. ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-target-tingkatkan-bauran-ebt>
- ESDM. (2025, September 22). Komoditas batubara pegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. *ESDM*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/komoditas-batubara-pegang-peranan-penting-bagi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Gaora, P. A., Pedrason, R., Herman, E., Irene, I., & Sylvia, S. (2023). Indonesia's climate diplomacy under Joko Widodo: Shaping equitable and sustainable global future. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1026>
- Hasyim, I. A., Azmi, A., & Zulfikar, M. (2024). Reviewing Indonesia's commitment in the Paris Agreement 2015 era of President Joko Widodo (new and renewable energy). *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 7(2). <https://doi.org/10.36624/jisora.v7i2.152>
- Herindrasti, S., Angelina, B., & Putriwinata, P. (2024). Pengembangan Kebijakan Energi Terbarukan di Indonesia, Vietnam, dan Laos. *Sospol*, 10(2), 154–172. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i2.35634>
- Herindrasti, V. L. S. (2022). Positioning Indonesia in the international world through energy transformation. *Journal of Social Political Sciences*, 3(2), 166–187. <https://doi.org/10.52166/jsps.v3i2.109>
- Hudson, V. M. (2005). *Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations*. *Foreign Policy Analysis*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x>

- Hudson, V. M. (2007). *Foreign policy analysis: Classic and contemporary theory*. Rowman & Littlefield.
- Hudson, V. M. (2014). *Foreign policy analysis* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- IBAI. (2024, January 25). *Indonesia dominates 34.1% of global coal exports in 2023*. <https://www.ibai.or.id/news/item/4657-indonesia-s-coal-exports-reach-all-time-high.html>
- IEA. (2022, September 1). *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia – Analysis*. IEA. <https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-indonesia>
- IEA. (2024). *An energy sector roadmap to net zero emissions in Indonesia: Executive summary*. <https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-indonesia/executive-summary>
- IESR. (2020). *Komitmen Pemerintah, Kebijakan yang Konsisten dan Transparan, dan Instrumen yang Tepat Mampu Menarik Investasi Energi Terbarukan di Vietnam, Indonesia Kapan? - IESR*. <https://iesr.or.id/komitmen-pemerintah-kebijakan-yang-konsisten-dan-transparan-dan-instrumen-yang-tepat-mampu-menarik-investasi-energi-terbarukan-di-vietnam-indonesia-kapan/>
- Kamisuna, T. (2024, May 24). *Problematic clean energy transitions in Indonesia in changing international order* (CSIS Commentaries No. 01324). Centre for Strategic and International Studies. [https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS\\_Commentaries\\_01324\\_Final\\_Final.pdf?download=1](https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/CSIS_Commentaries_01324_Final_Final.pdf?download=1)
- Kementerian ESDM. (2017). *Indonesia Tegaskan Komitmen Sukseskan Paris Agreement Pada One Planet Summit*.

<https://migas.esdm.go.id/post/indonesia-tegaskan-komitmen-sukseskan-paris-agreement-pada-one-planet-summit>

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Implementasi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon.*

<https://www.bappenas.go.id/berita/implementasi-ekonomi-hijau-melalui-pembangunan-rendah-karbon-QPkoU>

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and discord in global climate policy. *Nature Climate Change*, 6(6), 570–575.

<https://doi.org/10.1038/nclimate2937>

Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2010). *The regime complex for climate change* (Discussion Paper No. 2010-33). Harvard Project on International Climate Agreements.

[https://www.researchgate.net/publication/228212111\\_The\\_Regime\\_Complex\\_for\\_Climate\\_Change](https://www.researchgate.net/publication/228212111_The_Regime_Complex_for_Climate_Change)

KESDM. (2016). *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional.*

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-manajemen-rantai-penyediaan-dan-pemanfaatan-energi-nasional-.pdf>

KESDM. (2017, September 20). *Energi baru terbarukan dukung pencapaian kemandirian energi nasional.*

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/energi-baru-terbarukan-dukung-pencapaian-kemandirian-energi-nasional>

KESDM. (2021, July 27). *Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai.*

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai>

- KLHK. (2016). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Koreshi, J. M., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2025). Dinamika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim: Kajian Literatur tentang Diplomasi dan Kepentingan Nasional. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11.
- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 36(2), 185–205. <https://doi.org/10.1017/S0020818300018920>
- Lahope, G. (2024). Implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia Menuju 23% Target Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 2025. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 124-135. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.3945>
- Laksmi, B. I. (2018, November 11). *Menelan Duri Perubahan Iklim*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/11/11/menelan-duri-perubahan-iklim>
- Manahara, S., Putri, S. K., & W, I. S. K. (2023). Tantangan transisi energi terbarukan di Indonesia: (Studi kasus PLTS di Kabupaten Cilacap). *Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jimese.v1i1.2023.259>
- Massagony, A., Pandit, R., & White, B. (2025). Political economy of energy policy in Indonesia towards net zero emissions by 2060. *Energy for Sustainable Development*, 88, 101757. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2025.101757>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

- Morin, J.-F., & Paquin, J. (2018). *Foreign policy analysis: A toolbox*. Springer.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-61003-0>
- Mudhoffar, K., & Magriasti, L. (2024). Ekonomi Politik Energi Terbarukan: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 47–52. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1382>
- Neack, L., Hey, J. A. K., & Haney, P. J. (Eds.). (1995). *Foreign Policy Analysis: Continuity and change in its second generation*. Prentice Hall.
- Nofansya, A., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2023). Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 5(1), 75–90.  
<https://doi.org/10.24198/padjirv5i1.39685>
- Prasetyo, A., Susanto, I., & Mada, K. (2021). *Jejak dan Langkah Energi Terbarukan Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.  
<https://iesr.or.id/pustaka/jejak-dan-langkah-energi-terbarukan-indonesia/>
- Rahman, M. (2013). Indonesia Climate Diplomacy: An Eclectic Approach in Understanding the Logic of Action of Indonesia Foreign Policy on Climate Change Mitigation. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3053466>
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement*. JDIH BPK.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/37573>

- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/68772>
- Republik Indonesia. (2021). *Updated NDC Indonesia 2021*.  
<https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf>
- RUEN. (t.t.). *Rencana umum energi nasional*. Diambil 28 September 2025, dari  
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-umum-energi-nasional-ruen.pdf>
- Safitri, A., & Rohma, M. N. (2024). Indonesia's compliance with the Paris Agreement through energy transition in power generation 2016–2020. *Proceedings of the International Conference on Islamic Social Sciences and Humanities*, 2. <https://doi.org/10.20885/iconish.vol2.art10>
- Sarante, J. (2024, June). *Energi baru dan terbarukan sebagai teknologi alternatif di masa depan dalam mendukung pertahanan negara*. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/poahan/wp-content/uploads/2024/06/Energi-Baru-dan-Terbarukan.pdf>
- Setkab. (2015, Juli 5). *Bangun pembangkit listrik 35 ribu MW, Presiden: Jangan bertumpu pada batubara*. <https://setkab.go.id/bangun-pembangkit-listrik-35-ribu-mw-presiden-jangan-bertumpu-pada-batubara/>
- Sim, L.-C. (2025). Impact of the Russo-Ukrainian war on energy flows from the Arab Gulf states. *Middle East Institute*. <https://mei.edu/publication/impact-russo-ukrainian-war-energy-flows-arab-gulf-states/>

- Simanjuntak, U. (2021, November 12). *Subsidi energi fosil menghambat transisi energi*. IESR. <https://iesr.or.id/subsidi-energi-fosil-menghambat-transisi-energi/>
- Simanjuntak, U. (2024, Januari 17). *Mengejar target 23% bauran energi terbarukan di 2025 memerlukan strategi percepatan dan komitmen politik*. IESR. <https://iesr.or.id/mengejar-target-23-bauran-energi-terbarukan-di-2025-memerlukan-strategi-percepatan-dan-komitmen-politik/>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, E. E. (2024). The politics of Indonesia's renewable energy policy. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v3i1.15540>
- Tempo. (2023). *Pendanaan disebut bukan hambatan utama transisi energi di Indonesia, lalu apa?* <https://www.tempo.co/ekonomi/pendanaan-disebut-bukan-hambatan-utama-transisi-energi-di-indonesia-lalu-apa--108812>
- UNDP. (t.t.). *Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP)*. Diambil 2 Maret 2026, dari <https://www.undp.org/indonesia/projects/indonesia-just-energy-transition-partnership-jetp>
- UNFCCC. (t.t.). *Global stocktake*. Diambil 7 April 2026, dari <https://unfccc.int/topics/global-stocktake>
- United Nations Indonesia. (t.t.). *Apa itu perubahan iklim?* Diambil 12 Oktober 2025, dari <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>
- United Nations. (2015). *Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

- Wahyudi, I. (2023). *Hambatan Indonesia dalam implementasi COP-21 Paris Agreement terkait pengurangan emisi gas karbon dan transisi energi nasional* [Skripsi, Universitas Bosowa].
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2026: Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan: Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!* WALHI.
- Wijanarka, T., & Dewi, N. N. C. L. (2024). Peran pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi melalui South-South and Triangular Cooperation. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 286–312. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.498>